

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN BELU

TAHUN 2019



**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
KABUPATEN BELU
TAHUN 2019**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BELU TAHUN 2019

ISSN : -
Nomor Publikasi : 53060.2020
Katalog BPS : 4102004.5306
Ukuran Buku : 28 cm x 22 cm
Jumlah Halaman : x + 45

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu

Diterbitkan Oleh :

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu

Jl. DR. G.A. Siwabessy No 2 Atambua

Telp : 0389 – 21317, Fax : 0389 – 21317

e-mail : bps5306@bps.go.id

web : belukab.bps.go.id

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BELU TAHUN 2019

Anggota Tim Penyusun :

Pengarah : Yustinus Siga, A.St.

Editor : Agus Sofiana, SST

Penulis & Pengolah Data : Abdul Rosyid Remy Andryan, SST

Penyiapan Draft : Agus Sofiana, SST

Kontributor Data : Seksi Statistik Sosial BPS

<https://belukabps.guide>

KATA PENGANTAR

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2019 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan masyarakat kabupaten Belu antar waktu dan perbandingannya baik antar kecamatan maupun daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan).

Data yang digunakan bersumber dari BPS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Podes, dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019 ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Belu. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dan nasional pada umumnya.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Atambua, September 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Belu

ttd

Yustinus Siga, A.St

DAFTAR ISI

	Halaman
	<i>Page</i>
Kata Pengantar.....	v
Datar Isi	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
Istilah Teknis	x
1. Kependudukan	1
2. Kesehatan dan Gizi	9
3. Pendidikan	15
4. Ketenagakerjaan	21
5. Konsumsi dan Pengeluaran	25
6. Perumahan dan Lingkungan	29
7. Kemiskinan	33
8. Sosial Lainnya	37
Lampiran	41
Daftar Pustaka	45

<https://belukab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Tabel 1.1 Persentase Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan tahun 2019	4
2	Tabel 3.1 APS Kabupaten/Kota di Daratan Timor tahun 2019	18
3	Tabel 3.2 Jumlah sekolah, murid dan guru di Kabupaten Malaka Tahun 2019	20
4	Tabel 5.1. Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota di daratan Timor tahun 2019	27

<https://belukab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Gambar 1.1 Jumlah dan Laju pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belu berdasarkan Hasil Sensus Penduduk	2
2	Gambar 1.2. Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Belu per kecamatan tahun 2019	3
3	Gambar 1.3 Persebaran penduduk Kabupaten Belu menurut kecamatan tahun 2019	4
4	Gambar 1.4. Piramida Penduduk Kabupaten Belu menurut Kelompok umur tahun 2019	6
5	Gambar1.5. Pemakaian Alat KB di kabupaten Belu tahun 2019	8
6	Gambar 1.6. Tempat Memperoleh Alat KB di Kabupaten Belu tahun 2019	8
7	Gambar 2.1. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Belu tahun 2019	11
8	Gambar2.2. Persentase Fasilitas Kesehatan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Belu tahun 2015-2019	12
9	Gambar 2.3. Persentase Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Belu tahun 2015-2019	12
10	Gambar 2.4. Penyakit terbanyak di keluhan penduduk di Kabupaten Belu tahun 2019	13
11	Gambar 2.5 Pemberian ASI pada BADUTA di Kabupaten Belu tahun 2019	14
12	Gambar 3.1 APS Penduduk di daratan Timor tahun 2019	18
13	Gambar 3.2 APS Penduduk Kabupaten Belu Berdasarkan Kelompok umur tahun 2019	19
14	Gambar 3.3 APM Penduduk Kabupaten Belu menurut tahun 2019	19
	Gambar 3.4 Jumlah sekolah, murid dan guru di Kabupaten Belu Tahun 2019	20
15	Gambar 5.1 Persentase Penduduk Kabupaten Belu menurut Golongan Pengeluaran tahun 2019	27
16	Gambar 5.2 Perbandingan Konsumsi Per Kapita Kabupaten/Kota di Daratan Timor tahun 2019	28
17	Gambar 6.1 Persentase rumahtangga menurut status penguasaan bangunan tempat tinggal tahun 2019	31
18	Gambar 7.1 Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di daratan Timor tahun 2019	35
19	Gambar 8.1 Tingkat frekuensi bepergian penduduk kabupaten/Kota di daratan Timor tahun 2019	39
20	Gambar 8.2 Persentase Penerima manfaat kredit usaha di Kabupaten Belu tahun 2019	40

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Lampiran 1. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Persentasae Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu	42
2	Lampiran 2. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Belu	43
3	Lampiran 3. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas atas penguasaan Telepon Seluler di kabupaten Belu tahun 2019	43
4	Lampiran 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di daratan Timor, 2019	44
5	Lampiran 5. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di daratan Timor, 2015 - 2019	44

SINGKATAN DAN AKRONIM / ABBREVIATION AND ACRONYMS

AKB/*IMR* Angka Kematian Bayi/*Infant Mortality Rate*
APM/*NER* Angka Partisipasi Murni/*Net Enrollment Ratio*
APS/*SER* Angka Partisipasi Sekolah/*School Enrollment Ratio*
ASI Air Susu Ibu/*Breast Feeding*
BPS Badan Pusat Statistik/*Statistics - Indonesia*
KB Keluarga Berencana/*Family Planning*
Sakernas Survei Angkatan Kerja Nasional/*National Labour Force Survey*
SDKI Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia/*Indonesian Demographic and Health Survey*
SD/*PS* Sekolah Dasar/*Primary School*
SM/*SHS* Sekolah Menengah/*Senior High School*
SMP/*JHS* Sekolah Menengah Pertama/*Junior High School*
SP Sensus Penduduk/*Population Census*
SUPAS Survei Penduduk Antar Sensus/*Intercensal Population Survey*
Susenas Survei Sosial Ekonomi Nasional/*National Socio Economic Survey*
TFR *Total Fertility Rate* (Angka Fertilitas Total)
TPAK/*LFPR* Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/*Labour Force Participation Rate*
TPT/*OUR* Tingkat Pengangguran Terbuka/*Open Unemployment Rate*

<https://bep.kab.bps.go.id>

KEPENDUDUKAN

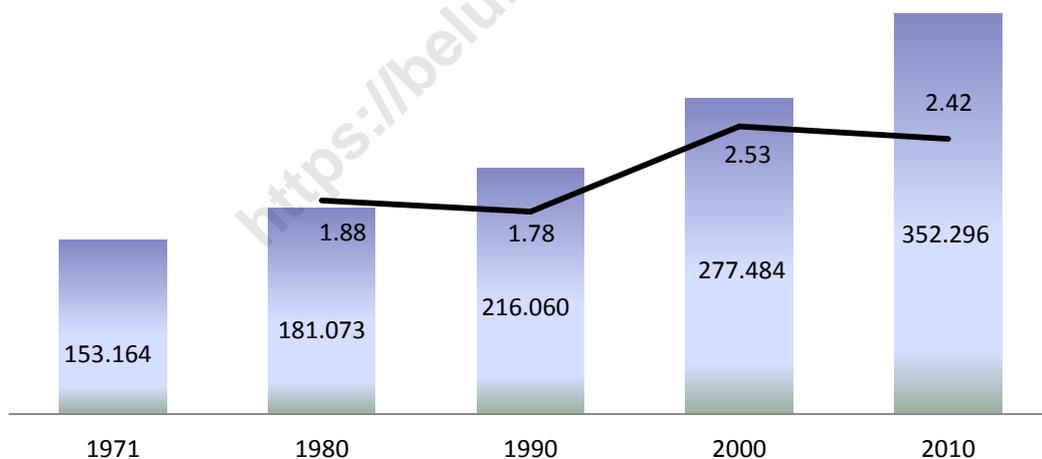
1

<https://belukap.bps.go.id>

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan sebuah negara karena sebagai pelaku utama sekaligus pengguna dari hasil - hasil pembangunan tersebut. Namun jumlah penduduk yang tidak seimbang, dalam arti komposisi penduduk yang didominasi umur muda dan distribusi penduduk antar wilayah tidak merata maka akan menjadi beban pembangunan. Jumlah penduduk yang tinggi manakala tidak diimbangi dengan ketersediaan "resources" yang memadai maka akan mendatangkan berbagai masalah sosial-ekonomi. Jumlah penduduk akan menjadi aset pembangunan apabila memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai serta laju pertumbuhannya dapat dikendalikan dan direncanakan.

A. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

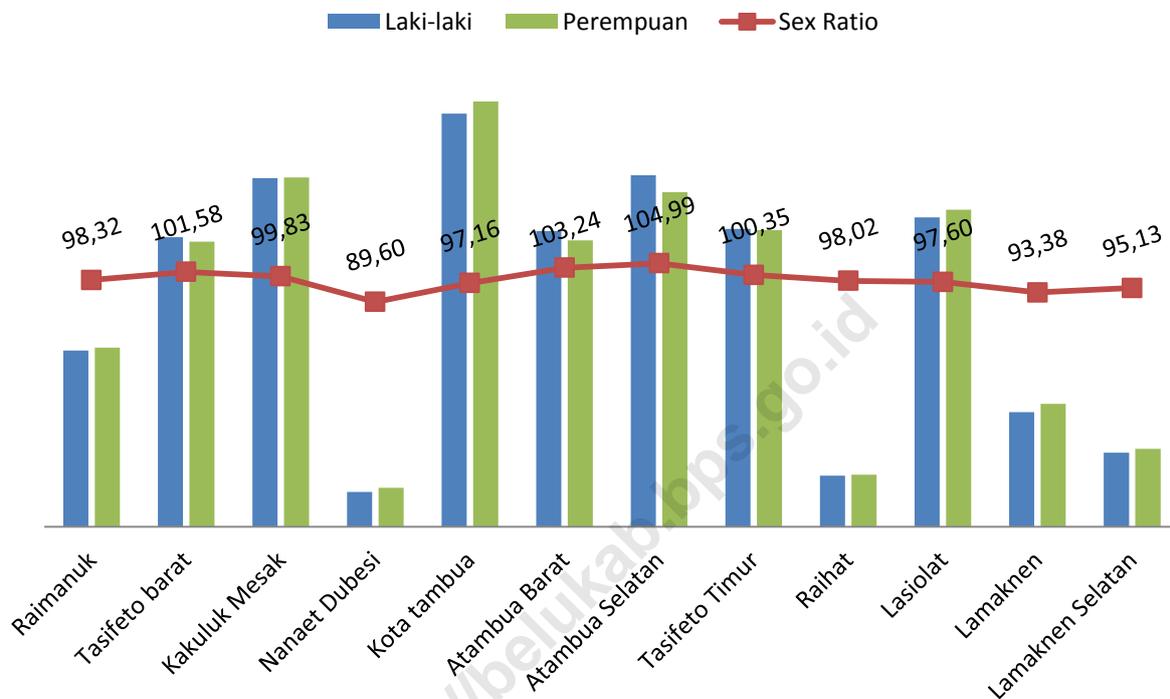
Hasil pendataan Sensus Penduduk (SP) tahun 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010 menunjukkan bahwa telah terjadi penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Belu/Malaka secara signifikan selama kurun waktu tersebut.



Gambar 1.1 Jumlah dan Laju pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belu berdasarkan Hasil Sensus Penduduk

Pada tahun 2000 jumlah penduduk kabupaten Belu/Malaka mencapai 277.484 jiwa meningkat lebih dari dua puluh delapan persen dalam kurun waktu sepuluh tahun dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,53 persen per tahun, pertumbuhan yang terlihat tinggi tersebut selain dipengaruhi oleh angka kelahiran alami penduduk juga dipengaruhi oleh migrasi masuk warga eks timor timur pasca jajak pendapatan dan pemisahan wilayah timor timur.

Data tahun 2019 hasil proyeksi Penduduk 2019 penduduk Belu sebanyak 220.116 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,54 persen. Rasio Jenis kelamin pada tahun 2019 adalah 98,00. Secara keseluruhan rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Belu menurut kecamatan terlihat pada grafik berikut.

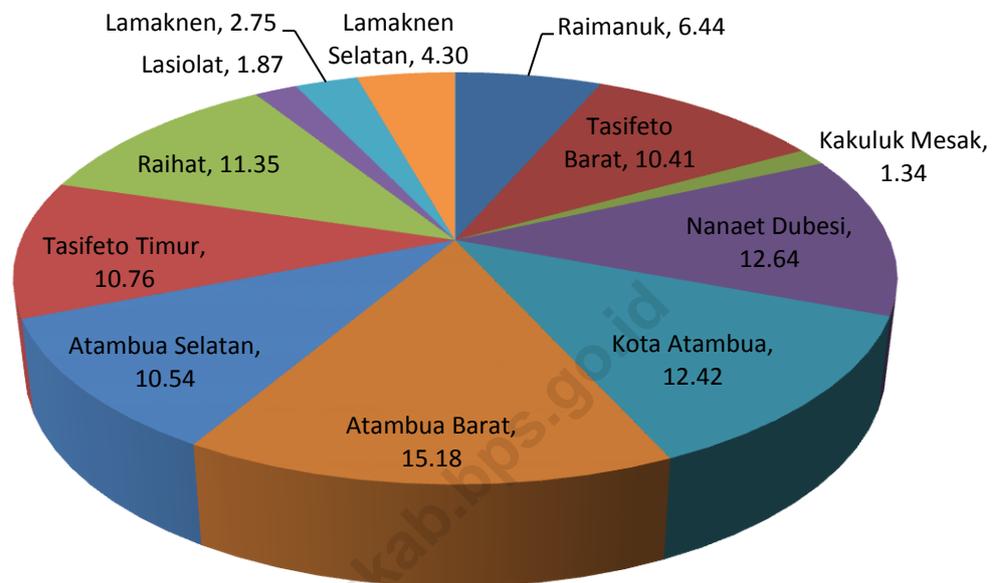


Gambar 1.2. Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Belu per kecamatan tahun 2019

Kecamatan dengan jumlah penduduk Laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan terdapat pada Kecamatan Tasifeto Barat, Atambua Barat, Atambua Selatan dan Tasifeto Timur. Kecamatan dengan rasio penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan terendah adalah kecamatan nanaet dubesi dimana hanya terdapat 89 penduduk laki-laki setiap 100 penduduk perempuan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Belu pada tahun 2019 adalah 109.882 jiwa sementara penduduk perempuan adalah 110.234 jiwa. Dengan kata lain penduduk laki-laki di kabupaten Belu pada tahun 2019 adalah lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Jumlah penduduk laki-laki yang lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan dikarenakan adat di kabupaten Belu dimana laki-laki masih sebagai pencari nafkah utama sehingga banyak penduduk laki-laki yang bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik.

B. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Topografi Kabupaten Belu yang memiliki karakteristik berbukit-bukit, wilayah pemukiman sejak nenek moyang, adat istiadat dan pusat kegiatan ekonomi ditengarai menjadi penyebab tidak meratanya persebaran penduduk di Kabupaten Belu.



Gambar 1.3: Persebaran penduduk Kabupaten Belu menurut kecamatan tahun 2019

Tabel 1.1 Persentase Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan tahun 2019

Kecamatan	Persentase penduduk	Persentase Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
Raimanuk	6,44	13,96	79
Tasifeto Barat	10,41	17,45	102
Kakuluk Mesak	12,64	14,60	148
Nanaet Dubesi	1,34	4,69	49
Kota Atambua	15,18	1,94	1.342
Atambua Barat	10,54	1,21	1.492
Atambua Selatan	12,42	1,22	1.738
Tasifeto Timur	10,76	16,45	112
Raihata	11,35	6,79	286
Lasiolat	1,87	5,02	64
Lamaknen	4,30	8,24	89

Lamaknen Selatan	2,75	8,44	56
------------------	------	------	----

Kecamatan dengan persentase luas wilayah terkecil adalah atambua dan kecamatan dengan persentase penduduk terbesar adalah atambua selatan. Kecamatan dengan persentase luas wilayah terbesar adalah tasifeto barat disusul tasifeto timur dan kakuluk mesak. Kecamatan dengan persentase penduduk terbesar adalah atambua selatan, diikuti atambua barat, kota atambua, dan kakuluk mesak.

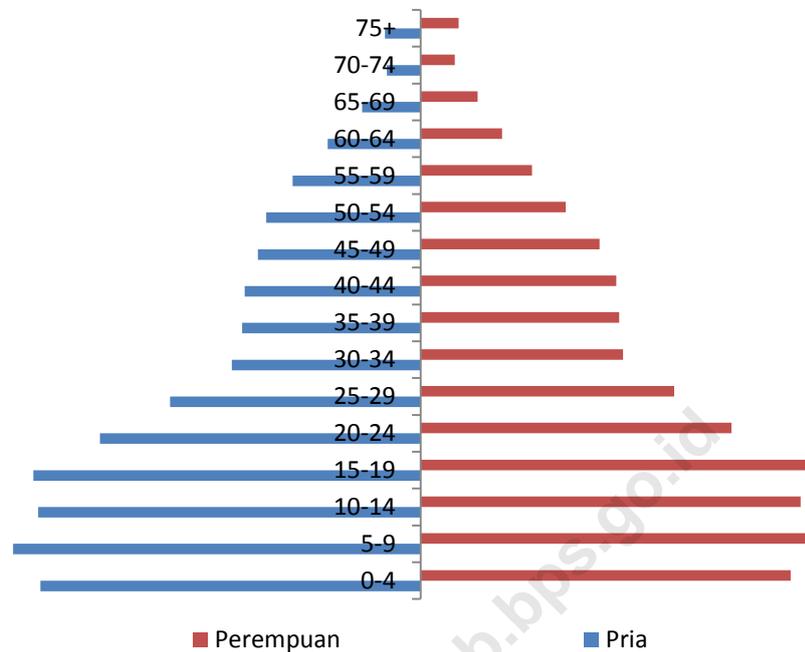
Pola kepadatan penduduk di Kabupaten Belu cenderung berbanding lurus mengikuti perkembangan aktivitas sosial ekonomi kecamatannya masing-masing tetapi berbanding terbalik dengan dan proporsi luas wilayahnya. Kecamatan yang luas wilayahnya relatif kecil namun potensi aktivitas sosial ekonominya tinggi maka terlihat lebih padat dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya. Sebagai pusat kegiatan aktivitas ekonomi, Kecamatan Atambua Selatan memiliki kepadatan penduduk tertinggi yakni 1.738 jiwa/km² pada tahun 2019, menyusul Atambua Barat 1.492 jiwa/km² dan kota atambua 1.342 jiwa/km². Sementara itu kecamatan Nanaet Dubesi menjadi kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yakni 49 jiwa per km².

C. Komposisi Umur dan Angka Beban Ketergantungan

Komposisi umur lebih banyak dipengaruhi oleh arah perkembangan penduduk secara alamiah yakni variabel kelahiran dan kematian. Dengan mengandalkan pada pertumbuhan penduduk alamiah maka apabila tingkat kematian menurun, sementara tingkat kelahiran naik atau tetap, maka bagian penduduk yang tergolong anak-anak akan meningkat dan secara ekonomi ikut mempengaruhi tingginya beban ketergantungan. Komposisi umur penduduk produktif Kabupaten Belu pada tahun 2019 sebesar 64,46 persen. Sementara angka penduduk non produktif sebesar 38,54 persen, dengan rincian 90 persen dari kelompok usia belum produktif dan 10 persen dari usia tidak produktif.

Berdasarkan gambar piramida penduduk Kabupaten Belu terlihat penduduk usia 0-4 tahun mulai menurun persentasenya. Penduduk usia muda yang sempat tercatat besar sepuluh tahun yang lalu sekarang sudah berada pada posisi penduduk usia produktif. Bagian dasar yang semakin menyempit menjadi tanda penurunan angka kelahiran. Dengan kata lain pengendalian kelahiran mulai terlihat hasilnya. Penduduk Laki-laki usia produktif

tertinggi pada kelompok usia 15-19 tahun dengan persentase lebih dari 18 persen terhadap total penduduk usia produktif.



Gambar 1.4. Piramida Penduduk Kabupaten Belu menurut Kelompok umur tahun 2019

Pada umumnya Angka beban tanggungan merupakan perbandingan antara penduduk usia produktif dan penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia produktif merupakan usia angkatan kerja, yang telah mampu untuk memperoleh penghasilan ataupun memenuhi kebutuhannya. Penduduk usia non produktif merupakan kelompok penduduk anak-anak dan lanjut usia yang bukan termasuk angkatan kerja. Angka beban tanggungan yang tinggi menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif dalam membiayai penduduk usia belum produktif dan tidak produktif.

Pada tahun 2019, angka beban ketergantungan Kabupaten Belu sebesar 62,72. Hal ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 63 orang penduduk belum dan tidak produktif. Angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 63,32. Dilihat berdasarkan kelompok penduduk usia tidak produktif, beban tanggungan anak di Kabupaten Belu menurun dari 57,10 pada tahun 2018 menjadi 56,45 pada tahun 2019. Sedangkan angka beban tanggungan lanjut usia juga mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu 3,85 meningkat dari tahun 2018 sebesar 3,81. Angka beban tanggungan anak yang tinggi menggambarkan bahwa laju kelahiran dan laju kematian bayi masih tinggi.

D. Fertilitas dan Keluarga Berencana

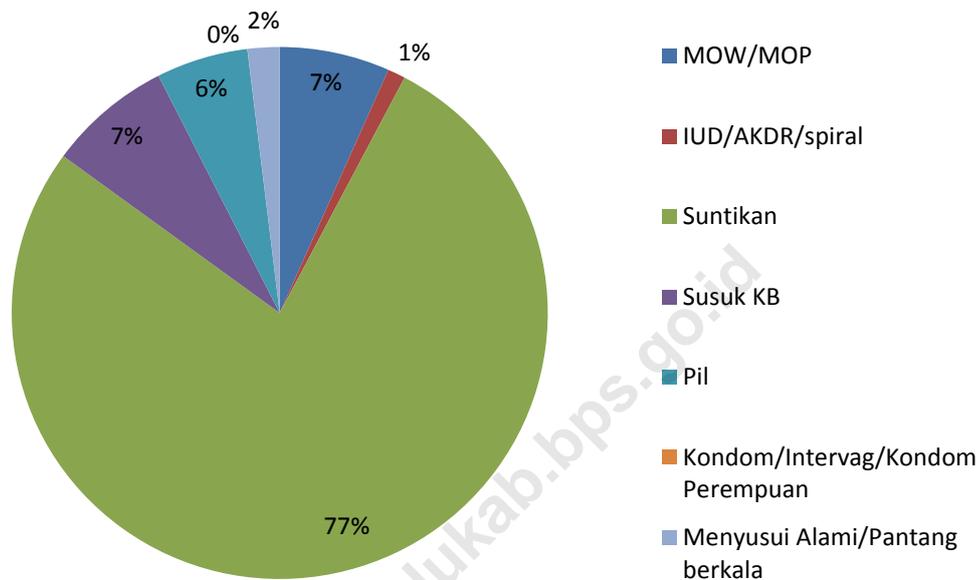
Kesehatan reproduksi berkaitan erat dengan kesehatan perempuan usia subur (15-49 tahun) dalam siklus haid, masa hamil, melahirkan dan menyusui. Kesehatan reproduksi menjadi sangat penting karena berhubungan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi. Diabaikannya kondisi kesehatan pada masa hamil, melahirkan atau menyusui dapat menyebabkan gangguan fisik, kesehatan ataupun mental bahkan kematian bagi perempuan maupun bayinya.

Fertilitas sangat dipengaruhi oleh usia kawin pertama perempuan dan angka prevalensi keluarga berencana (KB). Usia perkawinan pertama seorang perempuan berpengaruh terhadap resiko melahirkan. Semakin muda usia perkawinan pertama, akan semakin besar resiko keselamatan ibu maupun anak selama masa kehamilan maupun saat melahirkan. Hal ini disebabkan belum matangnya rahim untuk proses berkembangnya janin atau karena belum siapnya mental dalam menghadapi masa kehamilan maupun saat melahirkan. Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi usia perkawinan pertama, semakin tinggi pula resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan dan masa melahirkan.

Pada tingkat nasional keberhasilan program keluarga berencana telah diakui banyak kalangan. Untuk Kabupaten Belu, implementasi Program Keluarga Berencana di tingkat daerah sedikit banyak membawa dampak yang positif. Dalam kurun waktu 1989-1990 seorang wanita di Belu jika ia hidup sampai akhir masa reproduksinya, rata-rata dapat melahirkan lebih dari 4 orang anak. Angka tersebut lebih dikenal dengan istilah angka kelahiran total (TFR = Total Fertility Rate). Pada kurun waktu 1995-1996 angka ini masih relatif stabil yakni 4,48 dan baru pada tahun 2004-2005 mengalami penurunan menjadi 3,63.

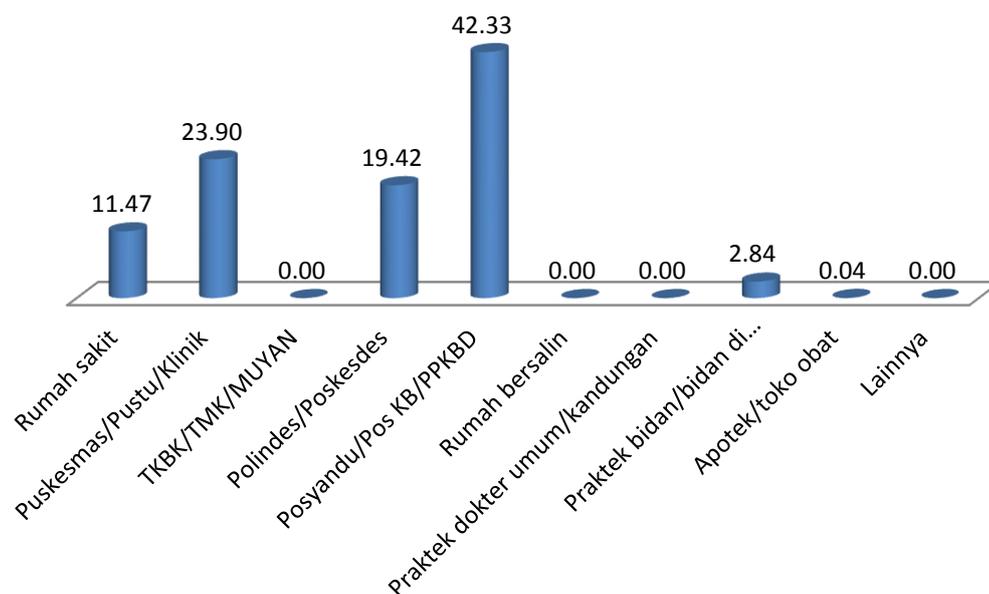
Meningkatnya TFR sangat berkaitan dengan usia perkawinan pertama. Umur perkawinan pertama merupakan umur pertama menikah, terutama untuk penduduk perempuan, yang berarti bahwa masa dimulainya reproduksi pembuahan. Semakin muda seorang wanita melaksanakan perkawinan pertama, maka semakin panjang usia reproduksinya, yang berarti peluang untuk melahirkan banyak anak akan semakin besar. Berdasarkan hasil Susenas 2019 masih terdapat 6,42 persen kejadian pernikahan pertama

pada wanita umur kurang dari sama dengan 16 tahun. Sementara untuk kasus melahirkan pada perempuan umur 15-49 tahun dengan bayi lahir hidup kurang dari 2500 gram dalam dua tahun terakhir sebesar 14,39 persen kasus. Pada wanita usia subur (usia 15-49 tahun) yang berstatus kawin, 56,46 persen diantaranya pernah menggunakan alat/cara KB sementara 43,54 persen lainnya tidak pernah menggunakan.



Gambar 1.5. Pemakaian Alat KB di kabupaten Belu tahun 2019

Berdasarkan jenis alat kontrasepsi yang digunakan pada ilustrasi diagram diatas, terlihat suntikan menjadi metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan di Kabupaten Belu pada tahun 2019.



Gambar 1.6. Tempat Memperoleh Alat KB di Kabupaten Belu tahun 2019

2

KESEHATAN DAN GIZI

<https://pelukab.bps.go.id>

Kesehatan menjadi isu penting dalam semua program kerja pemerintahan. Kondisi kesehatan penduduk dapat dilihat dari berbagai hal, angka kesakitan, keterjangkauan pelayanan kesehatan, tumbuh kembang anak, status gizi, perilaku hidup sehat dan sebagainya. Kondisi sumber daya manusia yang berkualitas berhubungan juga dengan kondisi kesehatan. Kondisi fisik yang sehat mendukung kesehatan jiwa serta kemampuan melakukan aktifitas dan menunjang produktifitas kerja. Penduduk anak yang sehat merupakan jaminan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik di masa yang akan datang.

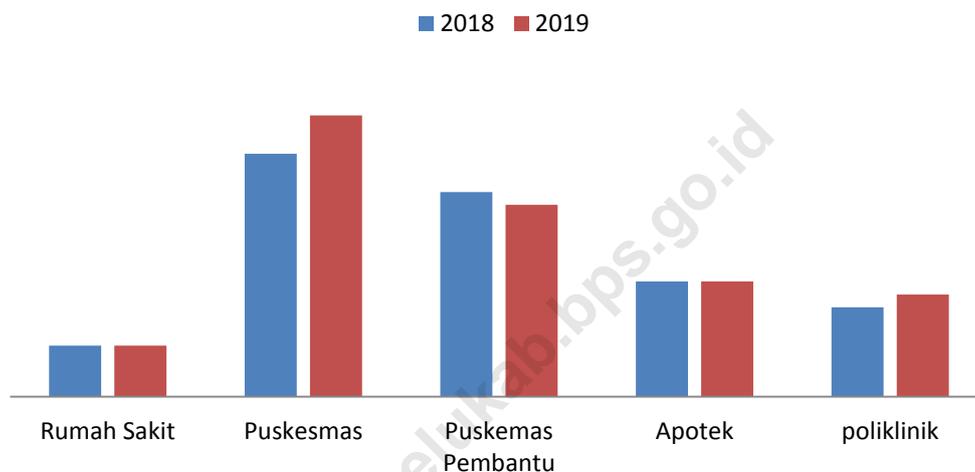
Pembangunan di bidang kesehatan terus diupayakan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah dijangkau, serta berlaku untuk segala usia secara berkesinambungan. Berbagai upaya yang dapat dinikmati antara lain melalui penyediaan berbagai fasilitas kesehatan dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai, yang diiringi ketersediaan tenaga medis berkualitas serta jaminan kesehatan bagi penduduk. Upaya pemerintah di satu sisi, perlu terus ditopang oleh perilaku masyarakat, yakni melalui kesadaran, kemampuan dan kemauan untuk hidup sehat.

Hasil susenas 2019 untuk angka kesakitan (morbiditas) sebesar 73,48 persen penduduk Belu tidak mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir periode pencacahan 2019. Dari 26,52 kasus keluhan terdapat 16,25 persen kasus yang mengganggu kegiatan sehari-hari. Masih terdapat 38,84 persen penduduk yang tidak menggunakan jaminan kesehatan saat berobat jalan.

Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga turut dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Sarana kesehatan tersebut berupa rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, balai pengobatan serta tenaga kesehatan. Ketersediaan sarana kesehatan termasuk di dalamnya kemudahan akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

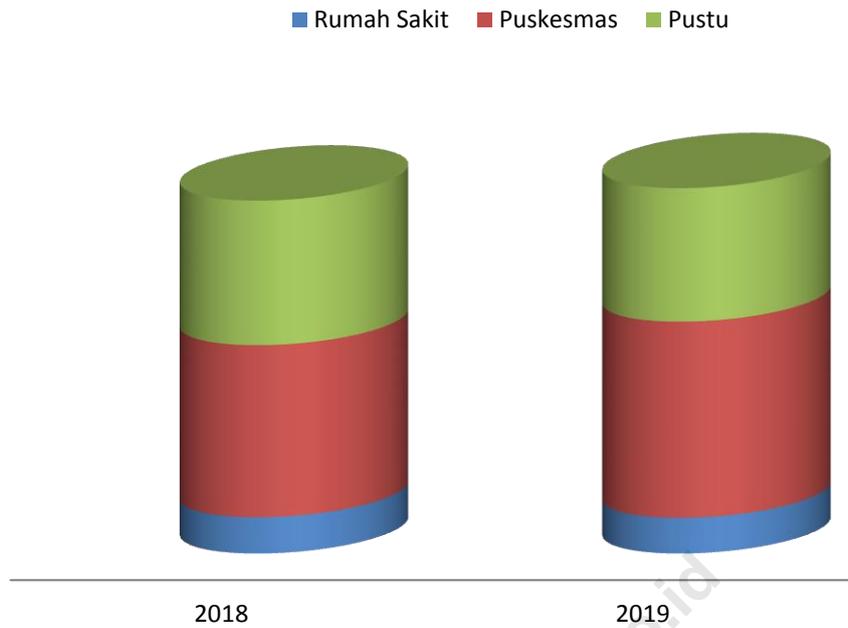
Pada tahun 2019 di Kabupaten Belu relatif tidak terlalu mengalami banyak perubahan jumlah fasilitas kesehatan. Perubahan terjadi di fasilitas penunjang berupa puskesmas, yakni mengalami peningkatan sebesar 15,79 persen. Hal ini sejalan dengan tujuan RPJMD Kabupaten Belu berupa peningkatan kesehatan masyarakat, sehingga turut mendorong belanja pemerintah untuk peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini juga dapat dijadikan indikasi semakin terjangkaunya fasilitas kesehatan yang lebih baik oleh penduduk.



Gambar 2.1. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Belu tahun 2019

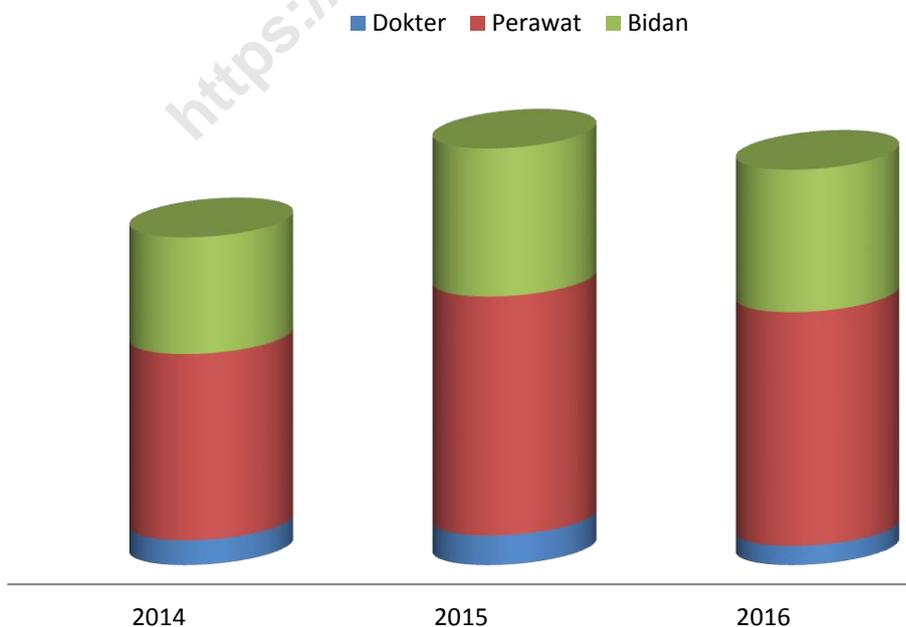
Pemanfaatan tenaga kesehatan dapat dilihat dari akses masyarakat terhadap fasilitas tempat berobat rujukan ketika mengalami sakit. Pemanfaatan kesehatan umumnya dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi penduduk serta kemudahan sarana transportasi dalam mencapai fasilitas kesehatan.

Hasil Susenas tahun 2019 menunjukkan bahwa secara umum, kondisi masyarakat yang lebih memilih mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga medis. kesadaran masyarakat akan hidup sehat semakin meningkat serta ditunjang dengan perbaikan kondisi sosial ekonomi dalam masyarakat. mendorong pergeseran perilaku masyarakat dalam memilih pelayanan kesehatan dari sebelumnya pelayanan kesehatan dari tenaga non medis/tradisional menjadi pelayanan kesehatan oleh tenaga medis/tenaga terlatih.



Gambar2.2. Persentase Fasilitas Kesehatan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Belu tahun 2018-2019

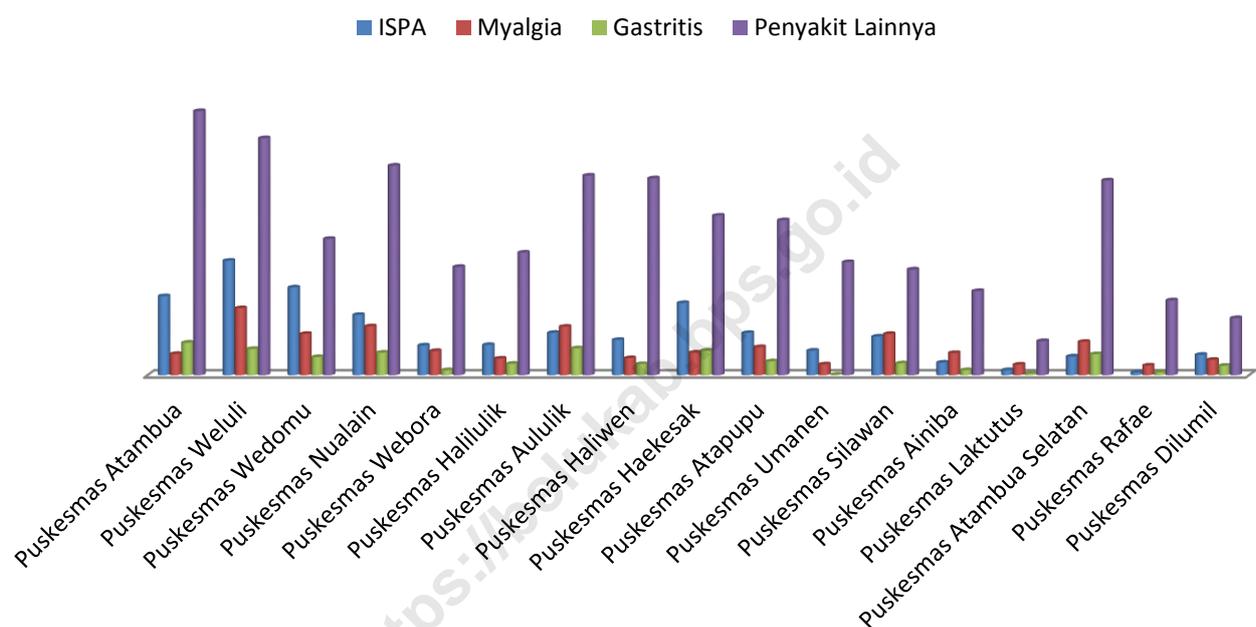
Berdasarkan informasi pada gambar 2.3, dapat disimpulkan tidak terlalu banyak perubahan persentase fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk Kabupaten Belu dalam kurun waktu dua tahun terakhir.



Gambar 2.3. Persentase Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Belu tahun 2014-2017

Berdasarkan Hasil Kecamatan Dalam Angka 2019 di Kabupaten Belu, didapat informasi 3 penyakit yang sering dikeluhkan masyarakat Belu pada tahun 2018 dan

tersebar di seluruh puskesmas di wilayah kabupaten Belu. Penyakit yang paling sering dikeluhkan pada tahun 2018 adalah ISPA. Penyakit ini dominan Karena di wilayah Kabupaten Belu masih rendah akan kesadaran kebiasaan hidup bersih dan sehat. Penyakit ISPA dapat dengan mudah menginfeksi di udara air dan makanan yang tidak terjaga kebersihannya. Selain itu daya tahan tubuh yang lemah turut memicu penularan penyakit ISPA.



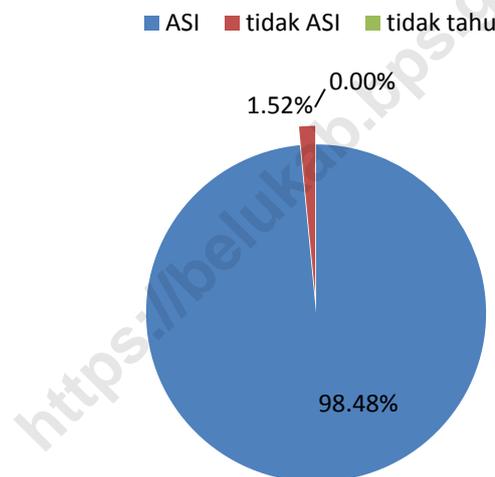
Gambar 2.4. Penyakit terbanyak di keluhkan penduduk di Kabupaten Belu tahun 2017

Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Kualitas kesehatan penduduk usia di bawah lima tahun (balita) juga turut menjadi bagian penting dalam pembangunan kesehatan. Beberapa indikator dalam mengukur tingkat kesehatan balita antara lain pemberian air susu ibu (ASI), pemberian imunisasi dan status gizi balita. Kesehatan anak juga turut menjadi perhatian, mulai dari proses kelahirannya hingga tumbuh kembang. Kesehatan anak saat ini merupakan cerminan masa depan bangsa yang lebih baik di masa mendatang. Kondisi kesehatan anak antara lain dipengaruhi oleh faktor kesehatan ibu, tenaga penolong pada saat lahir, pemberian ASI dan imunisasi serta cakupan zat

gizi yang dikonsumsi. Keberadaan penolong pada saat persalinan erat kaitannya dengan keselamatan bayi dan ibu melahirkan

Data Susenas 2019 menunjukkan bahwa persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan/medis di Kabupaten Belu telah mencapai 93,52 persen. Berarti bahwa kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan bantuan tenaga medis sudah semakin tinggi. Hal ini tentunya menjadi nilai plus untuk mengurangi resiko komplikasi, kecatatan atau kematian pada ibu dan bayi meninggal dalam proses persalinan. Selain penolong kelahiran, indikator kesehatan balita lainnya adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI). Hasil Susenas 2019 menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia kurang dari 2 tahun (baduta) di Kabupaten Belu pernah mendapatkan ASI (98,48 persen).



Gambar2.5. Pemberian ASI pada BADUTA di Kabupaten Belu tahun 2017

Selain pemberian ASI, indikator kesehatan anak lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah pemberian imunisasi. Pemberian imunisasi secara tepat pada anak balita dapat bermanfaat dalam memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu dan diharapkan dapat menurunkan jumlah kematian bayi dan balita. Berdasarkan hasil pencatatan kartu imunisasi/buku imunisasi balita, sebanyak 72,45 persen balita telah mendapatkan imunisasi dan sisa 27,55 persen balita yang tidak menerima imunisasi di tahun 2019.

<https://belukab.bps.go.id>

3

PENDIDIKAN

Salah satu tugas pokok pemerintah berdasarkan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kualitas SDM dan daya saing bangsa erat sekali kaitannya dengan kualitas Pendidikan nasional, sementara pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh pembangunan pendidikan di masing-masing daerah. Program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan bangsa dalam berbagai aspek pembangunan karena pendidikan yang berhasil akan membentuk kualitas sumber daya manusia untuk menjadi modal sekaligus pelaku utama dari seluruh proses pembangunan. Indikator pendidikan antara lain angka melek huruf dan buta huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk, ketersediaan sarana pendidikan, dan partisipasi penduduk usia sekolah.

Angka Melek Huruf dan Buta Huruf

Salah satu indikator yang dapat mengukur capaian di bidang pendidikan adalah angka melek huruf. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis. AMH yang semakin tinggi di suatu wilayah mengindikasikan mutu serta kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut semakin baik. Peningkatan AMH selalu sejalan dengan penurunan angka buta huruf. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meningkatnya AMH secara tidak langsung menggambarkan bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam menyerap informasi, meningkatkan intelektualitas pribadi serta berkomunikasi secara tertulis. AMH didefinisikan sebagai persentase penduduk 10 tahun ke atas yang dapat membaca menulis huruf latin atau huruf lainnya.

Berdasarkan hasil Susenas, AMH penduduk Kabupaten Belu pada tahun 2017 sebesar 87,40. Perkembangan AMH laki-laki lebih besar dari AMH perempuan, dimana AMH laki-laki 91,13 sedangkan AMH perempuan 85,97. Fenomena ini terjadi dari tahun ke tahun, hal ini masih didukung adat kebiasaan dimana laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga sehingga diutamakan dalam mendapatkan pendidikan demi mempermudah akses pekerjaan.

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun dijalani seseorang dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah merupakan ukuran yang dipakai dalam menggambarkan kualitas sumber daya manusia. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Belu pada tahun 2019 sebesar 7,79, yang berarti bahwa penduduk Belu yang berumur 15 tahun ke atas secara rata-rata dapat menempuh pendidikan sampai kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tingkat pendidikan telah ditamatkan penduduk dapat menjadi indikator dalam mengukur kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan seseorang berarti semakin luas pengetahuan serta ketrampilan yang dimiliki, yang olehnya dapat memperluas peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Status pendidikan penduduk Kabupaten Belu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, walaupun tidak terlalu signifikan. Adapun konsep indikator tingkat pendidikan yang digunakan disini termasuk di dalamnya seseorang yang telah tamat program Kejar Paket A setara dengan tamat SD, tamat Paket B setara dengan tamat SMP, dan tamat Paket C setara dengan tamat SMA. Pada tahun 2019, secara umum penduduk Kabupaten Belu berusia 7-24 tahun ke atas yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SD-SMA mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tingkat Partisipasi Penduduk Usia Sekolah

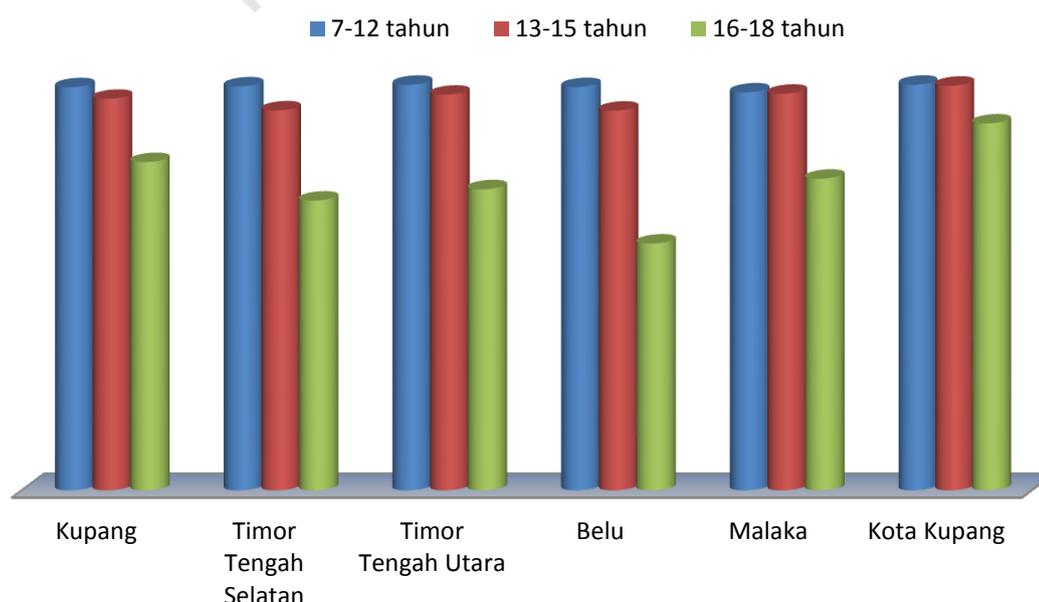
Indikator pendidikan penting lainnya selain rata-rata lama sekolah adalah partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah terdiri dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APS merupakan indikator pendidikan yang digunakan untuk mengetahui persentase penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah tanpa melihat jenjang pendidikan yang sedang

diduduki. Berdasarkan data susenas 2019 rata-rata APS Kabupaten Belu dan beberapa Kabupaten/Kota di tahun 2019 terlihat pada table 3.1

Table 3.1 APS Kabupaten/Kota di Daratan Timor Tahun 2019

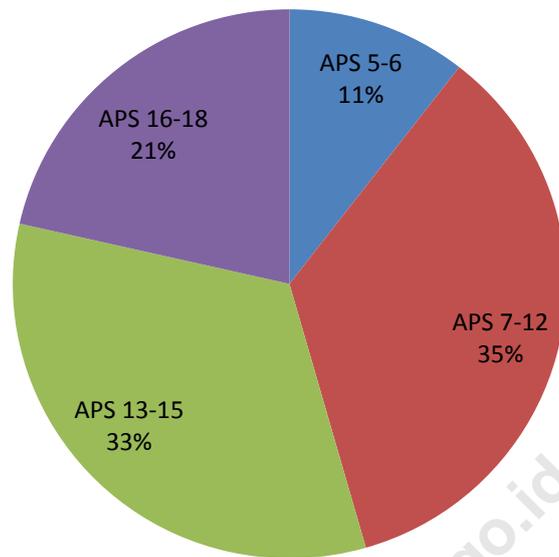
No	Kabupaten	7-12 Tahun	13- 15 Tahun	16-18 Tahun
1	Kupang	98,39	95,57	80,17
2	Timor Tengah Selatan	98,58	92,74	70,79
3	Timor Tengah Utara	98,98	96,58	73,56
4	Belu	98,42	92,68	60,35
5	Malaka	97,12	96,81	76,12
6	Kota Kupang	98,99	98,76	89,57

Berdasarkan informasi pada tabel 3.1 diatas terlihat APS Kota Kupang tahun menempati posisi tertinggi di daratan timor disemua kelompok usia. Ini wajar karena akses untuk memperoleh pelayanan pendidikan lebih mudah, ditunjang ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di perkotaan yang lebih beragam. Untuk Kabupaten Belu APS usia 7-12 tahun menempati posisi keempat, menempati posisi ke terakhir untuk usia 13- 15 tahun dan 16- 18 tahun.



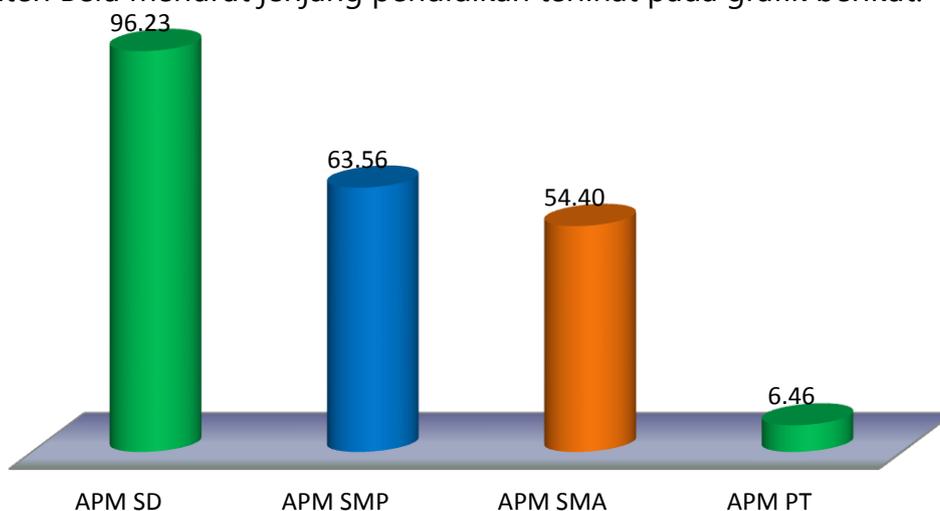
Gambar 3.1 APS Penduduk di daratan Timor tahun 2019

APS penduduk Kabupaten Belu berdasarkan kelompok umur terlihat pada diagram berikut.



Gambar 3.2 APS Penduduk Kabupaten Belu Berdasarkan Kelompok umur tahun 2019

Selain APS, untuk mengetahui tingkat pelayanan dan mutu pendidikan pada setiap jenjang pendidikan diperlukan angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK). APM menggambarkan persentase anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya sedangkan APK menggambarkan persentase anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat batasan umur anak. Berdasarkan data susenas APM penduduk Kabupaten Belu menurut jenjang pendidikan terlihat pada grafik berikut.



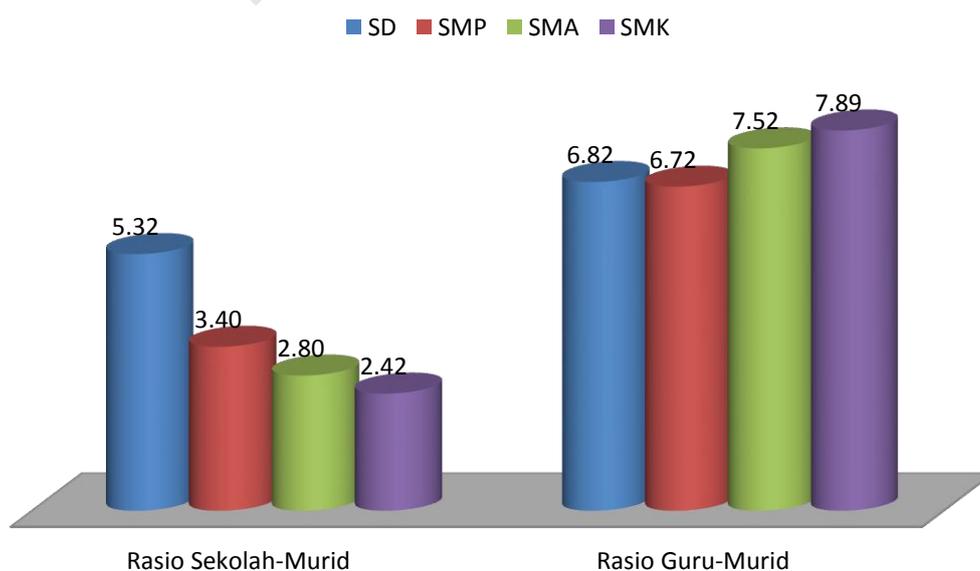
Gambar 3.3 APM Penduduk Kabupaten Belu menurut tahun 2019

Ketersediaan Sarana Pendidikan

Salah satu indikator dalam mengukur peningkatan profil pendidikan adalah melalui rasio murid-sekolah dan rasio murid-guru. Pemerataan akses pendidikan adalah melalui rasio murid-guru. Rasio murid-guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid-guru menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar. Semakin tinggi rasio murid-guru berarti bahwa semakin banyak peserta didik yang harus diajar oleh seorang guru dan berarti pula proses belajar mengajar menjadi kurang efektif. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Belu selama tahun ajaran 2018/2019, rasio murid-guru SD dan SMP mengalami peningkatan dibandingkan tahun ajaran sebelumnya.

Tabel 3.2 Jumlah sekolah, murid dan guru di Kabupaten Belu Tahun 2019

NO	Uraian	SD	SMP	SMA	SMK
1	Sekolah	147	48	24	9
2	Guru	1884	950	645	293
3	Murid	27628	14135	8579	3714



Gambar 3.4. Jumlah sekolah, murid dan guru di Kabupaten Belu Tahun 2019

<https://belukab.bps.go.id>

4

KETENAGAKERJAAN

Masalah kependudukan sangat erat kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan. Ketersediaan tenaga kerja sangat tergantung pada besar kecilnya penambahan penduduk. Penyediaan atau penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti kesempatan kerja yang memadai akan menimbulkan pengangguran. Dengan demikian banyaknya penduduk yang tidak memperoleh lapangan pekerjaan maka akan mengganggu stabilitas sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

A. Kegiatan Penduduk Usia Kerja dan TPAK

Pada tahun 2019 jumlah penduduk usia kerja (umur 15 tahun keatas) di Kabupaten Belu sebanyak 144.184 orang. Dari jumlah tersebut yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja (bekerja dan mencari kerja) sebanyak 63,48 persen (91.526 orang). Sisanya 36,52 persen (52.658 orang) tergolong bukan angkatan kerja. Dari jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja, kegiatan utamanya seminggu lalu (saat survei) bersekolah sebanyak 32,03 persen, mengurus rumahtangga 52,39 persen dan kegiatan lainnya seperti pensiunan yang tidak bekerja, orang lumpuh dan orang jompo sebanyak 15,58 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan seberapa besar kesiapan penduduk usia kerja untuk terjun kedalam pasar kerja. TPAK penduduk Kabupaten Belu tahun 2019 sebesar 63,48 persen atau mengalami penurunan dibandingkan dengan TPAK tahun 2018 sebesar 65,62 persen.

B. Tingkat Pengangguran dan Penggunaan Jam Kerja

Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan persentase penduduk yang aktif mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja. Pada tahun 2018 terdapat sekitar 5,33 persen yang mencari kerja (pengangguran terbuka) meningkat menjadi 7,19 persen pada tahun 2019. Angka ini tergolong rendah namun jika dikaitkan dengan tingkat pendapatan perkapita penduduk Belu yang masih sangat rendah, maka jika ditelusuri lebih detail sesungguhnya tingkat pengangguran terselubung

dan setengah pengangguran di Belu masih cukup tinggi terutama di sektor pertanian.

Pada tahun 2019 dalam penggunaan jam kerja di NTT, 45,77 persen pekerja yang menggunakan waktu 35 jam keatas. Bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) sebesar 54,23 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran untuk bekerja sesuai jam kerja normal yang juga sangat mempengaruhi tingkat produksi dan produktivitas pekerja dan apabila kondisi ini terus terjadi maka pada akhirnya akan berdampak pada rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan.

C. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Seperti halnya ciri-ciri daerah yang baru berkembang, pada tahun 2015 di Kabupaten Belu sebagian besar penduduk bekerja di sektor tradisional. Dari 88.223 penduduk yang bekerja sekitar 59.78 persen bekerja di sektor pertanian (primer), sedangkan sisanya di sektor sekunder 5,78 persen dan sektor tersier sebesar 34.44 persen. Bila kondisi struktur tenaga kerja tahun 2015 dibandingkan dengan keadaan tahun 2000 memperlihatkan bahwa telah terjadi transformasi tenaga kerja dari sektor primer ke sektor modern (sekunder dan tersier) karena pada tahun 2000 penduduk yang bekerja pada sektor tradisional tersebut masih 76,15 persen. Kendati demikian transformasi tenaga kerja terutama ke industri pengolahan masih bersifat "semu" karena pada umumnya usaha industri pengolahan yang digeluti merupakan usaha sampingan dan musiman yang dilakukan sekedar mengisi waktu luang sambil menunggu musim hujan tiba (contohnya industri tenun ikat).

D. Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan.

Secara keseluruhan dari jumlah penduduk yang bekerja, masih cukup banyak yang berstatus sebagai pekerja keluarga (pekerja tidak dibayar). Besarnya pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar ini pada tahun 2019 mencapai 15,59 persen. Tingginya persentase jumlah pekerja yang berstatus pekerja keluarga/pekerja tidak

dibayar mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas karena rata-rata pekerja jenis ini jumlah jam kerja dan tingkat keahliannya relatif rendah. Komposisi status pekerja yang juga disoroti adalah kategori pekerja yang berusaha dibantu anggota keluarga/buruh tidak dibayar cukup tinggi yakni sebesar 30,90 persen dan pekerja yang berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain sekitar 19,78 persen. Pada kelompok tersebut apabila didukung dengan sentuhan program pemberdayaan masyarakat maka dapat diharapkan akan menjadi cikal bakal suatu usaha yang kuat dan mapan. Untuk kelompok pengusaha dengan buruh tetap hanya 2,99 persen dan pekerja berstatus buruh/karyawan 28,20 persen. Demikian pula halnya dengan komposisi penduduk yang bekerja menurut sektor formal dan non formal, dimana terjadi penumpukan pekerja pada sektor non formal karena biasanya tidak menuntut adanya klasifikasi tingkat ketrampilan dan keahlian yang tinggi.

<https://belukab.bps.go.id>

5

KONSUMSI DAN PENGELUARAN

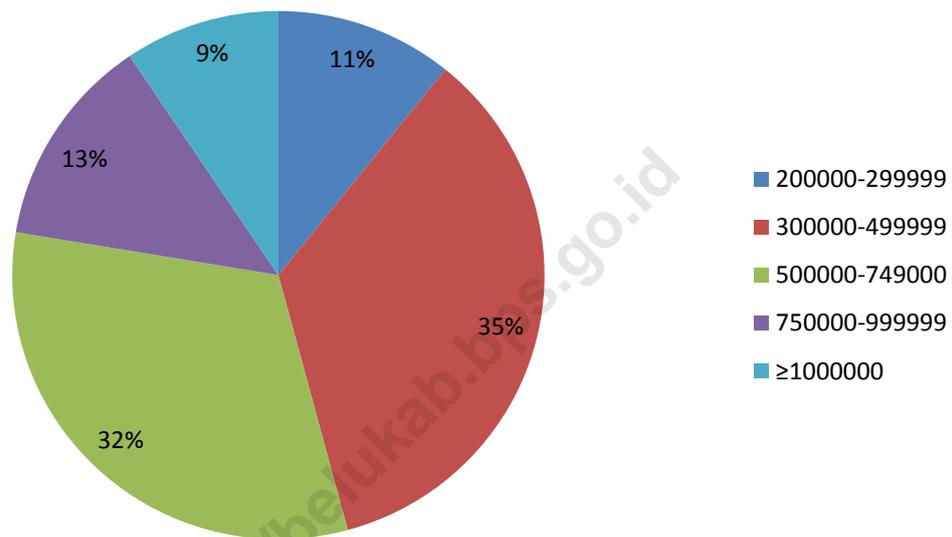
Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat di suatu wilayah secara kuantitatif dapat dilihat antara lain dari seberapa besar pendapatan yang diperoleh masyarakat. Semakin besar pendapatan/penghasilan suatu masyarakat dapat dipastikan akan semakin tinggi tingkat kesejahterannya. Dalam Susenas yang dilakukan BPS, pendekatan yang digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat adalah pendekatan pengeluaran rumahtangga. Apabila penghasilan suatu rumahtangga tinggi maka cenderung pengeluarannya baik untuk konsumsi makanan maupun non makanan akan lebih tinggi dari pada rumah tangga yang berpenghasilan rendah.

Proporsi antara pengeluaran makanan dan non makanan juga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk non makanan terhadap seluruh pengeluaran rumahtangga menunjukkan bahwa tingkat kesejahterannya tinggi, sebaliknya semakin tinggi tingkat persentase pengeluaran rumahtangga untuk makanan terhadap total pengeluaran maka tingkat kesejahterannya relatif rendah. Bagi rumahtangga yang berpenghasilan rendah, hampir seluruh pendapatan digunakan untuk kebutuhan konsumsi makanan, sedangkan yang berpenghasilan tinggi lebih separuh penghasilannya akan dimanfaatkan untuk keperluan non makanan seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lain-lain. Di negara yang sedang berkembang biasanya jenis pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar (lebih dari 50%) dari total pengeluaran rumahtangga. Dengan demikian perubahan angka persentase tersebut akan menunjukkan tingkat perkembangan taraf kehidupan masyarakat suatu negara/daerah. Sebaliknya di negara / daerah yang sudah maju, jenis pengeluaran untuk bukan makanan merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumahtangga.

Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan adalah hasil bagi antara total pengeluaran seluruh penduduk selama satu bulan dengan jumlah penduduk. Untuk Kabupaten Belu pada tahun 2019 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan sebesar Rp. 741.934,- meningkat lebih dari 9 persen dari Rp. 670.364,- di tahun 2018.

Peningkatan nominal pengeluaran per kapita ini memperlihatkan adanya kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, selain juga didorong oleh kenaikan harga barang dan jasa berbagai kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan pokok adalah hak masyarakat yang hakiki karena itu betapapun harganya tinggi tetap diupayakan untuk dibelanjakan.

Gambar 5.1 Persentase Penduduk Kabupaten Belu menurut Golongan Pengeluaran tahun 2019

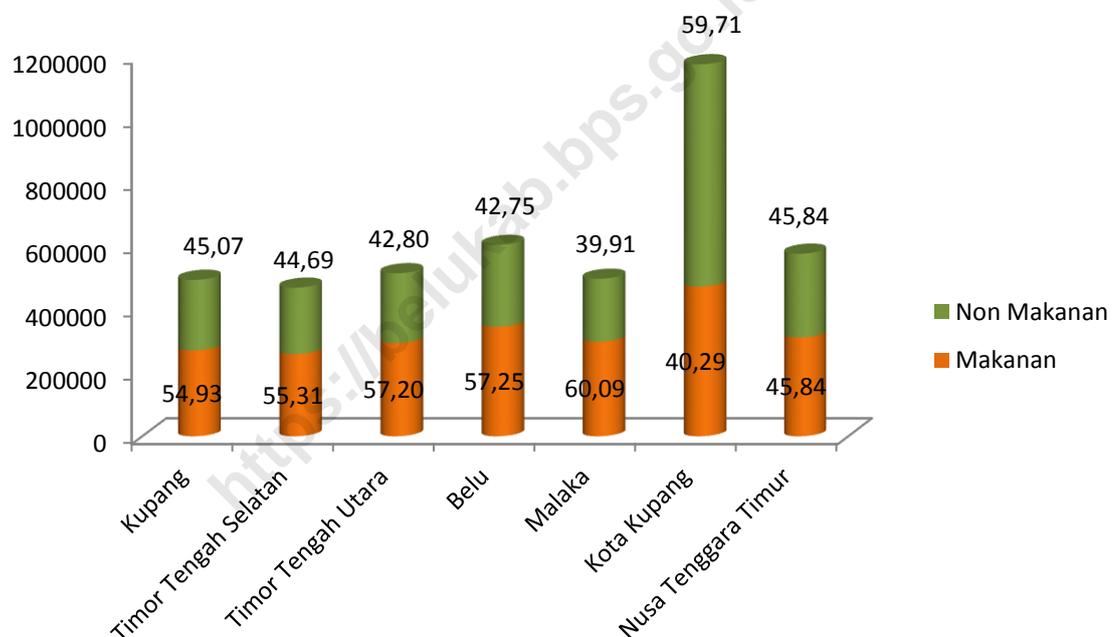


Tabel5.1. Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota di daratan Timor tahun 2019

No	Wilayah	Pengeluaran per Kapita		Total
		Makanan	Non Makanan	
1	Kupang	382.564	293.810	676.374
2	Timor Tengah Selatan	410.106	247.417	657.523
3	Timor Tengah Utara	384.333	220.414	604.747
4	Belu	413.017	328.917	741.934
5	Malaka	299.715	201.046	500.761
6	Kota Kupang	579.627	733.791	1.313.418
7	Nusa Tenggara Timur	399.251	282.232	681.484

Berdasarkan informasi pada table 5.1, hampir semua kabupaten memiliki pola kelompok pengeluaran yang relatif sama yakni kelompok makanan. Dengan kata lain sebagian penduduk masih berorientasi untuk memenuhi kebutuhan makan dan belum mengarah ke investasi, kecuali kota Kupang. Kabupaten Belu termasuk Kabupaten dengan pengeluaran per kapita yang relatif tinggi, sedikit di bawah pengeluaran per kapita provinsi Nusa Tenggara Timur. Kendati demikian, konsumsi penduduk Kabupaten Belu juga masih terkonsentrasi untuk pemenuhan kebutuhan makanan, yakni lebih dari 55 persen dari total pengeluaran per kapita.

Gambar 5.2 Perbandingan Konsumsi Per Kapita Kabupaten/Kota di Daratan Timor tahun 2019



Dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya sedikit pergeseran dalam komposisi pengeluaran konsumsi untuk kebutuhan makanan dan non makanan. Pada tahun 2019 dimana dari total pengeluaran Rp. 741.934,- proporsi pengeluaran makanan sebesar 55,67% dan non makanan sebesar 44,33%, sedangkan untuk tahun 2018 proporsi pengeluaran per kapita penduduk untuk makanan sebesar 54,11% dan non makanan sebesar 45,89% .

6

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

<https://belukabps.go.id>

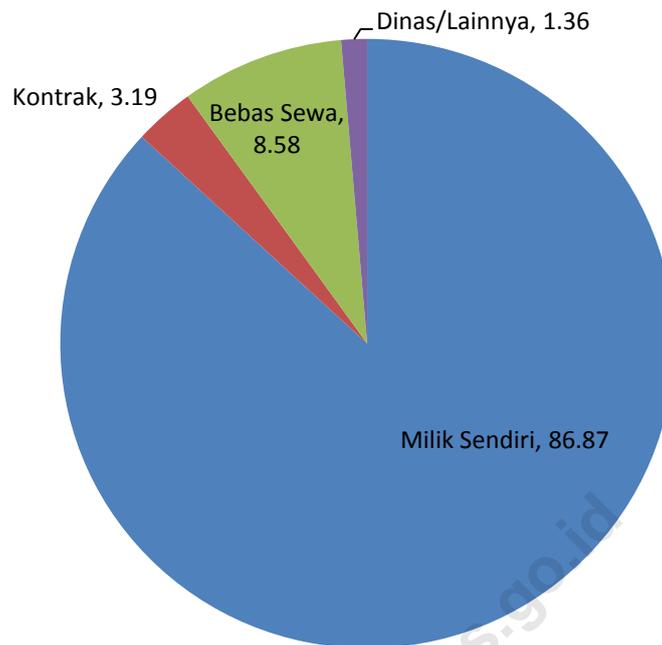
Hasil Susenas 2019 memperlihatkan bahwa tidak banyak penduduk yang tinggal di rumah yang permanen dan layak huni. Untuk mengatasi masalah perumahan ini, pemerintah melalui program rumah murah telah membangun perumahan yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Penyediaan rumah tinggal juga telah dilakukan oleh pihak swasta dengan bantuan kredit BTN yang terutama diperuntukkan bagi penduduk daerah perkotaan yang kurang mampu. Selain itu pembangunan rumah *resettlement* untuk warga ekspengungsi dan warga lokal banyak membantu perbaikan kualitas perumahan dan lingkungan di Kabupaten Belu.

A. Kualitas Perumahan

Pada tahun 2019 sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Belu memiliki rumah dengan luas 20-49 m² (49,09 persen) dan sekitar 42,29 persen dengan luas 50-99 m². Untuk jenis atap sebesar 93,89 persen rumah masyarakat di Kabupaten Belu beratapkan seng, sedangkan hanya sebesar 3,71 persen yang masih beratapkan ijuk/rumbia. Pada tahun 2019 masih banyak rumah tangga yang kualitas lantainya kurang memenuhi standar kesehatan. Tercatat sebanyak 21,21 persen rumah tangga masih dengan rumah berlantai tanah. Namun kondisi ini semakin menurun bila dibanding dengan tahun tahun sebelumnya.

Untuk dinding rumah tinggal sebagian rumahtangga masih memanfaatkan pelepah daun gewang sebagai pilihan. Hal ini tergambarkan dari 59,84 persen rumah tangga yang masih mempunyai rumah dengan dinding lainnya (bebak). Sedangkan rumah dengan jenis dinding tembok seluruh sekitar 35,68 persen. Khusus untuk rumah dinding campuran (setengah tembok) pada umumnya terkategori sebagai jenis dinding lainnya karena referensi yang dipakai adalah jenis dinding terluas. Sedangkan menurut status penguasaan bangunan tempat tinggal, lebih dari 86 persen penduduk Kabupaten Belu, menguasai bangunan milik sendiri. Hal ini terlihat pada gambar 6.1 berikut.

Gambar 6.1 Persentase rumahtangga menurut status penguasaan bangunan tempat tinggal tahun 2017



B. Fasilitas Perumahan

Alat/lampu penerangan rumahtangga sangat berpengaruh baik untuk aktivitas ekonomi rumahtangga maupun partisipasi penduduk dalam mengakses informasi melalui media elektronik. Pada tahun 2019 sekitar 86,43 persen rumahtangga menggunakan penerangan listrik dari PLN dan non PLN sebanyak 2,06 persen. Sedangkan 11,51 persen masih menggunakan sumber penerangan non Listrik. Dalam penggunaan bahan bakar memasak untuk keperluan rumahtangga, sebagian besar menggunakan kayu bakar yakni 74,42 persen. Sedangkan hanya 0.65 persen rumah tangga menggunakan elpiji 12 kg sebagai bahan bakar utama untuk memasak, hal ini dimungkinkan karena pasokan listrik yang masih rendah serta gas yang harus di datangkan dari pulau jawa oleh pera pedagang, bukan dikelola oleh Pertamina. Ketersediaan pasokan bahan bakar listrik dan gas, serta tingginya harga bahan bakar minyak memaksa masyarakat untuk menggunakan kayu sebagai sumber bahan bakar utama. Padahal tingginya persentase rumahtangga pengguna kayu bakar sebagai bahan bakar untuk memasak menjadi sumber ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup.

Salah satu fasilitas rumah yang paling utama adalah tersedianya air bersih untuk air minum dan MCK. Penyediaan air bersih di Kabupaten Belu untuk kebutuhan air minum masih merupakan masalah serius yang sampai saat ini belum tertangani secara baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya debit air dari sumber mata air dan mahalnya biaya membangun jaringan penyaluran air sehingga mempersulit jangkauan pelayanan air bersih terhadap masyarakat. Tahun 2019 sekitar 7,01 persen rumahtangga menggunakan air leding sebagai sumber air minum. Sementara mayoritas penduduk menggunakan sumur (49,07 persen) dan mata air (34,73 persen), air permukaan sebanyak 3,59 persen. Salah satu faktor yang sangat menentukan kualitas kesehatan masyarakat adalah keadaan sanitasi fasilitas buang air besar. Pada tahun 2019 dari jumlah rumahtangga yang ada di Belu sudah sekitar 80,91 persen yang fasilitas buang air besarnya berjenis leher angsa, sedangkan selebihnya masing-masing plengsengan 10,50 persen, cemplung/cubluk 8,59 persen.

<https://belukabps.go.id>

<https://belukab.bps.go.id>

7

KEMISKINAN

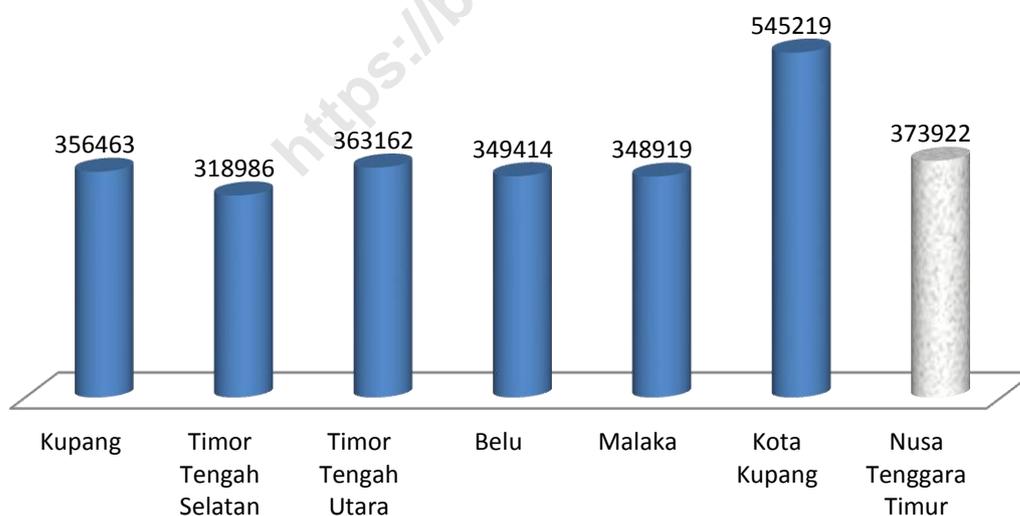
Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua negara, terutama negara sedang berkembang. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Khususnya di negara berkembang masalah kemiskinan merupakan puncak dari berbagai masalah sosial dan ekonomi yang saling terkait.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga menghadapi peliknya masalah kemiskinan, sehingga kemiskinan menjadi prioritas utama melalui program-program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah banyak menggulirkan berbagai program yang menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan, namun diakui masih banyak program yang dianggap belum tepat sasaran atau belum menyentuh permasalahan yang mendasar dalam masyarakat. Selain itu, program yang ada dinilai masih bersifat reaktif, jangka pendek dan parsial. Untuk mendukung pemerintah dalam menyusun berbagai program pengentasan kemiskinan yang efektif, menyeluruh, dan berkelanjutan dibutuhkan sistem informasi kemiskinan yang handal. BPS telah mengembangkan beberapa indikator kemiskinan melalui sensus dan survei-survei yang dilakukan dengan metode yang selalu disempurnakan. Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dalam bab ini disajikan beberapa indikator kemiskinan baik yang bersifat makro. Indikator kemiskinan makro diperoleh diperoleh melalui survei BPS yakni Susenas, dengan menggunakan sampel sehingga hanya bisa menghasilkan angka perkiraan jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu wilayah secara umum namun tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana lokasi penduduk miskin.

Perkembangan Penduduk Miskin Secara Makro

Secara makro, penduduk yang masuk kategori miskin ditentukan dengan menggunakan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. BPS telah mengembangkan metode penghitungan garis kemiskinan berdasarkan kriteria tertentu. Metode yang digunakan untuk menghitung Garis Kemiskinan (GK), terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Perhitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. GK setiap tahun berubah atau mengalami peningkatan. GK Kabupaten Belu pada tahun 2019 adalah Rp. 349.414,- per kapita per bulan .

Garis Kemiskinan 2019



Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin di Kabupaten Belu sebesar 15,70 persen, menurun menjadi 15,54 persen pada tahun 2019. Secara absolut jumlah penduduk miskin cenderung meningkat dari 33.910 orang pada tahun 2018 menjadi sekitar 34.080 orang pada tahun 2019.

Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan

Kemiskinan tidak hanya menyangkut jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin. Analisis lebih lanjut bagaimana kondisi kemiskinan yang terjadi dapat dilakukan dengan menggunakan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk terhadap GK. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan untuk Kabupaten Belu dalam beberapa tahun terakhir ini cenderung meningkat. Pada tahun 2017, indeks kedalaman kemiskinan sebesar 2,50, kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi 2,17 persen. Kemudian meningkat lagi menjadi 2,66 persen di tahun 2019. Diharapkan nilai P1 semakin kecil, dengan demikian penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan terangat kondisinya. Ditinjau dari tempat tinggalnya, P1 di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang tinggal di desa lebih jauh dari garis kemiskinan dibandingkan dengan penduduk miskin yang tinggal di perkotaan. Sebaran penduduk miskin menggambarkan ketimpangan antar penduduk miskin yang digambarkan oleh indeks keparahan. Semakin tinggi angka indeks ini maka semakin besar ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Pada tahun 2019 indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Belu meningkat 16 point menjadi 0,61 persen, dibandingkan dari tahun sebelumnya sebesar 0,45 persen. Ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk miskin yang tinggal di perkotaan.

<https://bps.kab.bps.go.id>

8

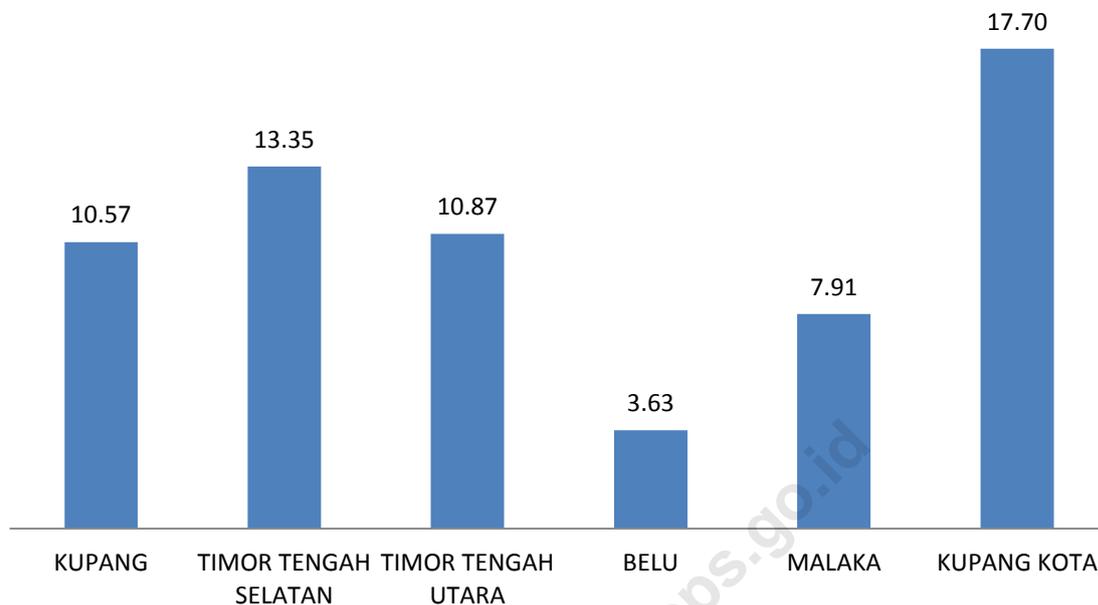
SOSIAL LAINNYA

Perjalanan wisata merupakan suatu proses bepergian sementara waktu menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan, maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman, atau pun untuk belajar. Perjalanan wisata sudah saat ini sudah merupakan kebutuhan hidup yang mengindikasikan kesejahteraan masyarakat. Semakin meningkatnya kesejahteraan, masyarakat cenderung untuk memenuhi kebutuhan tertierinya seperti berwisata. Selain perjalanan wisata, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi taraf kehidupan suatu masyarakat, kebutuhannya terhadap informasi, hiburan, dan komunikasi juga meningkat. Kehidupan terasa kurang lengkap jika kebutuhannya akan hal tersebut belum terpenuhi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha ataupun program perlindungan sosial. Semakin banyak masyarakat yang memperoleh kredit usaha maka akan menunjang usahanya dan meningkatkan kesejahteraan. Program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah juga turut memberikan andil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perjalanan Wisata

Perjalanan wisata yang menjadi indikator dalam Susenas adalah perjalanan adalah perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela, kurang dari 6 bulan dan bukan merupakan kegiatan rutin untuk bersekolah atau bekerja (memperoleh upah/gaji) di tempat yang dituju. Perjalanan wisata mencakup di dalamnya mengunjungi objek wisata komersial atau menginap di usaha jasa akomodasi komersial dan atau jarak perjalanan pulang pergi 100 kilo meter. Gambar 8.1 menunjukkan bahwa frekuensi penduduk yang melakukan perjalanan di Kabupaten/Kota di daratan Timor. Berdasarkan informasi pada Grafik, tingkat penduduk yang bepergian di Kabupaten Belu masuk kategori terendah dibandingkan Kabupaten /Kota lain di daratan Timor.

Gambar 8.1 Tingkat frekuensi bepergian penduduk kabupaten/Kota di daratan Timor tahun 2019



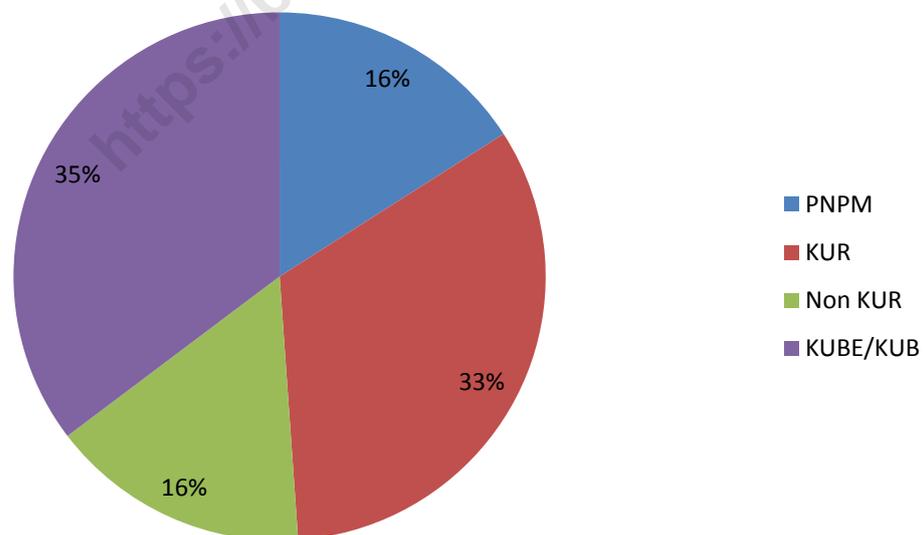
Akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat sekarang ini sangat terlihat jelas pada peningkatan kepemilikan alat komunikasi, seperti telepon seluler, komputer, dan akses internet. Kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan hiburan saat ini bukan lagi menjadi sesuai yang mewah namun cenderung sebagai bagian dari gaya hidup terutama pada masyarakat pada tingkatan yang lebih mapan. Data Susenas menunjukkan peningkatan penggunaan alat komunikasi tertinggi pada telepon seluler sejalan dengan penggunaan telepon rumah yang semakin berkurang. Masyarakat saat ini lebih memilih menggunakan telepon seluler dari sisi kepraktisan, dapat di bawa ke manamana dan lebih bersifat pribadi. Selain itu, telepon seluler memiliki multi fungsi dan dapat melakukan berbagai tugas (*multi tasking*) seperti untuk mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, gambar atau foto, video atau film, GPS serta dilengkapi berbagai fitur lain yang menarik. Secara umum, jumlah rumah tangga menguasai telepon seluler hanya sebesar 43,28 persen di tahun 2019. Sedangkan penggunaan internet masih sangat rendah yakni pada angka 23,63 persen.

Pemberian Kredit Usaha

Aliran dana ke masyarakat berupa kredit usaha berdampak kepada pergerakan ekonomi rakyat dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan. Gejolak ekonomi yang sering mengakibatkan krisis ekonomi berkepanjangan akan menyulitkan penduduk yang miskin dan golongan ekonomi lemah. Mereka harus dibantu pemerintah dengan berbagai program pelayanan sosial yang memiliki dampak pada pemberdayaan masyarakat. Beberapa program pemberian kredit usaha dari pemerintah di antaranya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan sejenisnya. Selain itu juga ada program kredit usaha yang disalurkan oleh swasta atau BUMN seperti Bank, Koperasi, maupun perorangan. Berdasarkan susenas 2019, persentase rumahtangga di Kabupaten Belu yang menerima kredit usaha hanya sebesar 29,46 persen.

Gambar 8.2 Persentase Penerima manfaat kredit usaha di Kabupaten Belu tahun 2019



<https://belukab.bps.go.id>

9

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Rasio Jenis Kelamin	Luas Area	Kepadatan wilayah	persentase penduduk
1	Raimanuk	8.247	8.017	16.264	102,87	179,42	91	7,85
2	Tasifeto Barat	11.789	12.394	24.183	95,12	224,19	108	11,67
3	Kakuluk Mesak	9.911	9.984	19.895	99,27	187,56	106	9,60
4	Nanaet Dubesi	2.186	2.389	4.575	91,50	60,25	76	2,21
5	Kota Atambua	14.481	15.397	29.878	94,05	24,90	1.200	14,42
6	Atambua Barat	11.988	11.680	23.668	102,64	15,55	1.522	11,42
7	Atambua Selatan	11.693	11.919	23.612	98,10	15,73	1.501	11,40
8	Tasifeto Timur	11.621	11.303	22.924	102,81	211,37	108	11,07
9	Raihat	6.693	6.627	13.320	101,00	87,20	153	6,43
10	Lasiolat	3.445	3.386	6.831	101,74	64,48	106	3,30
11	Lamaknen	6.755	7.258	14.013	93,07	105,90	132	6,76
12	Lamaknen Selatan	3.942	4.065	8.007	96,97	108,41	74	3,86
	Belu	102.751	104.419	207.170	98,04	1284,96	161	100,00

Lampiran 2. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Belu

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
1	0-4	12.435	11.785	24.220
2	5-9	13.757	13.044	26.801
3	10-14	13.097	12.216	25.313
4	15-19	11.768	11.241	23.009
5	20-24	8.113	8.345	16.458
6	25-29	6.605	7.217	13.822
7	30-34	5.742	6.669	12.411
8	35-39	5.599	6.549	12.148
9	40-44	5.792	6.338	12.129
10	45-49	5.406	5.716	11.122
11	50-54	4.960	4.778	9.738
12	55-59	4.104	3.706	7.810
13	60-64	2.966	2.653	5.619
14	65-69	2.148	2.056	4.204
15	70-74	1.331	1.359	2.690
16	75+	1.365	1.448	2.813

Lampiran 3. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas atas penguasaan Telepon Seluler di kabupaten Belu dan Malaka tahun 2018

No	Jenis Kelamin	Belu		Malaka	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Laki-laki	44.37	55.63	40.46	59.54
2	Perempuan	34.27	65.73	31.84	68.16
	Jumlah	39.33	60.67	35.91	64.09

Lampiran 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di daratan Timor,2017

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Angka Harapan Hidup/ <i>Life Expectancy</i> (Tahun/ Year)	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun/ Year)	Angka Harapan Lama Sekolah/ <i>Expected years of Schooling</i> (Tahun/ Year)	Pengeluran per kapita Disesuaikan/ <i>Percapita Expenditure</i> (Ribu/ Thousand Rp)	IPM
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
03. Kupang	63.33	13.48	6.93	7,217	62.39
04. Timor Tengah Selatan	65.60	12.53	6.27	6,360	60.37
05. Timor Tengah Utara	66.14	13.27	7.13	5,930	61.54
06. Belu	63.21	12.02	7.06	7,199	61.04
21. Malaka	64.27	12.28	6.31	5,658	58.29
22. Kupang	68.46	15.76	11.44	12,986	78.14
Nusa Tenggara Timur	66,04	12,97	7,02	7 122	63,13

Lampiran 5. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di daratan Timor, 2015 - 2017

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Batas Kemiskinan <i>Poverty Line</i> (Rp/Kapita/Bln)		Jumlah Penduduk Miskin <i>Total of Poor People</i> (Ribu Orang/ Thousand People)		Persentase Penduduk Miskin <i>Percentage of Poor People</i> (%)	
	2017	2019	2017	2019	2017	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
03. Kupang	282 496	309 208	80,98	82,57	23,37	23,43
04. Timor Tengah Selatan	254 454	276 727	144,01	138,43	31,12	29,89
05. Timor Tengah Utara	290 296	316 487	61,96	59,34	25,20	24,07
06. Belu	279 442	300 914	34,75	33,13	16,81	15,82
21. Malaka	279 799	302 584	32,28	31,14	17,28	16,66
22. Kupang	455 924	482 857	39,73	39,59	10,21	9,97
Nusa Tenggara Timur	297 864	322 947	1 159,84	1 149,92	22,61	22,19

DAFTAR PUSTAKA

- 2014 Indikator Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- 2014 Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- 2014 Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, Maret 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- 2014 Indikator Kesejahteraan Rakyat Nusa Tenggara Timur Tahun 2013. Kupang: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 2019 Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2019. Kupang: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 2014 Proyeksi Penduduk Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupaten/Kota 2010/2020 Kupang: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 2020 Statistik Kesejahteraan Rakyat Nusa Tenggara Timur 2019. Kupang: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur